

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan penting dalam perubahan sosial. Masyarakat yang memiliki sistem pendidikan yang maju tentu saja dapat mempercepat perubahan sosial dalam masyarakat tersebut, dan sebaliknya. Singkatnya, pendidikan memberikan sumbangan pada perubahan sosial yang terjadi pada individu maupun masyarakat. Pendidikan sebagai bagian dari perubahan sosial pada dasarnya memiliki dua fungsi yang saling bertentangan. Sampai pada titik ini, pendidikan masih berada pada posisi yang dilematis dalam sebuah struktur sosial.¹

Transformasi era yang ditandai dengan arus globalisasi dan *society 5.0* (masyarakat yang super pintar dan mampu menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang terintegrasi dengan dunia maya dan ruang fisik) menuntut pendidikan responsif akan tantangan zaman tersebut. Arus globalisasi memiliki pengaruh besar terhadap perubahan pola hidup manusia, mulai dari sosial budaya, hukum, ekonomi serta sikap keagamaan. Hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya yang berbeda bangsa dan negara menjadi terbuka semakin luas karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dengan teknologi mereka mudah untuk bertukar informasi. Perubahan tersebut menimbulkan berbagai masalah baru dalam kehidupan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia.² Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut ditandai dengan beragamnya etnis, suku, agama, budaya dan adat

¹ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 265.

² Menurut data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada tanggal 1 juni 2022, Indonesia memiliki jumlah penduduk dengan total 275.773.800 jiwa, 3,39% dari penduduk dunia. Jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, yakni tahun 2018, Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk sekitar 11 juta jiwa dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 264.161.600 jiwa. Lihat <https://www.bps.go.id/indikator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, diakses pada tanggal 17 maret 2023.

istiadat yang terdapat didalamnya. Dari Sabang sampai Merauke terdapat beragam tipologi masyarakat. Dengan latar belakang masyarakat yang berbeda dan unik tersebut, Indonesia memiliki potensi sebagai kekuatan dan dapat dijadikan sebagai modal sosial pembangunan bangsa. Akan tetapi, juga dapat memicu timbulnya konflik dan gesekan-gesekan sosial yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ketika keberagaman tersebut tidak disikapi secara bijak.³

Indonesia terdiri dari 16.771 pulau, sekitar 11 ribu pulau dihuni oleh penduduk dengan jumlah 1.340 suku dan 715 bahasa. Mengacu pada PNPS No. 1 tahun 1965 yang telah ditolak *judicial review*-nya oleh Mahkamah Konstitusi dengan dengan nomor 140/PUU-VII/2009, Indonesia memiliki lima agama. Kemudian pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Konghucu menjadi agama keenam. Meskipun hanya enam, di dalam masing-masing agama tersebut terdiri dari berbagai aliran dalam bentuk organisasi sosial. Begitu juga dengan ratusan aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.⁴

Multikultural secara sederhana berarti kebudayaan yang beragam. Multikultural tidak hanya menyangkut masalah SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) melainkan keragaman yang lebih luas, seperti kemampuan fisik maupun non fisik, umur, status sosial, dan lain sebagainya. Multikultural merupakan sebuah konsep atau ide yang menekankan pada keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan atau kesetaraan. Artinya setiap individu diperlakukan sama, tidak ada diskriminasi dan pengebirian hak.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi

³ Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme: Pandangan Baru PAI di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2011), 13. Dan juga Menurut undang-undang dasar Negara tersebut, agama yang resmi dan diakui oleh pemerintah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Meskipun hanya lima yang diakui secara resmi, tetapi pemerintah tetap memberikan kebebasan bagi penganut kepercayaan di luar lima agama tersebut, seperti Shinto, Sunda Wiwitan, Kejawen, Darmo Gandul, dll.

⁴ Ihwanul Mu'adib, "Pendidikan Berwawasan Multikultural: Dakwah Kontra Radikalisme Dari Pesantren", *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan* Vol 23 No. 1 (Desember 2019): 1-21..

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Bunyi pasal tersebut mengindikasikan bahwa pandangan multikulturalisme menjadi salah satu bahan pertimbangan khusus dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Pada konteks ini dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Harapan yang lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan adanya sikap intoleran (*intolerable*) seperti inkuisisi (pengadilan negara atas sah tidaknya teologi atau ideologi), peran agama, diskriminasi, dan hegemoni budaya ditengah kultur monolitik dan uniformitas global.⁵

Keterbukaan dan akomodasi terhadap kemajemukan atau pluralitas itu menjadi keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena itu secara legal-formal Indonesia harus membangun kebijakan yang mampu menjamin hak dasar setiap warga negara, mampu memberikan peluang yang setara dalam mengemukakan pendapat dan kesempatan kerja, mengembangkan inovasi dalam kebersamaan, dan menjamin eksistensi kesetaraan posisi setiap warga negara di mata hukum. Salah satu tradisi pendidikan Islam yang menganut sikap inklusif, akomodatif dan relatifis itu adalah tradisi pesantren. Tradisi pesantren itu dikembangkan atas dasar nilai keikhlasan dan ketulusan.⁶

Adanya kenyataan bahwa Indonesia memiliki corak masyarakat dengan berbagai keragamannya menjadi salah satu pendorong munculnya gagasan tentang pendidikan multikultural sebagai salah satu model pendidikan di masa mendatang. Menurut Muhaemin El-Mahdy bahwa realitas multikultural mendorong adanya kebutuhan yang mendesak untuk merekonstruksi ”kebudayaan nasional Indonesia” atau ”budaya bangsa” yang dapat menjadi

⁵ Henry Alexis Rudolf Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), 123.

⁶ Fazlur Rahman, *Kajian terhadap Metode, Epistemologi, dan Sistem Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 152.

”*integrating force*” yang dapat mengikat seluruh keragaman etnis, suku, bangsa, dan budaya tersebut.⁷

Akhir-akhir ini kehidupan umat beragama di Indonesia mengalami dinamika yang cukup keras dengan munculnya radikalisme yang menuntut keprihatinan kita bersama sebagai bangsa. Sesungguhnya pemerintah sudah mengatur kehidupan beragama ini dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Mulai dari UU Program Pembangunan Nasional Bidang Keagamaan No 25 Tahun 2000 tentang peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama. Peraturan Presiden No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Kemudian surat Keputusan Menteri Agama No. 70/1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.

Meskipun pemerintah sudah menerbitkan berbagai macam peraturan dan undang-undang yang mengatur tata kehidupan beragama agar terjadi harmonisasi kemanusiaan sejati, namun sepertinya radikalisasi atas nama agama tidak berhenti, justru sebaliknya kian hari semakin bertambah dengan berbagai bentuk, baik itu penganiyaan, pembakaran, perobohan tempat ibadah, penodaan ajaran dan keyakinan agama, serta penghinaan terhadap keyakinan agama atau pemahaman ajaran orang lain.

Menurut Gus Muhammad Ma'mun selaku Ketua Pondok Pesantren Al-Falah Ploso bahwa kurang efektifnya langkah-langkah untuk memutus rantai radikalisme disebabkan oleh pendekatan yang cenderung militeristik yang mengedepankan proses hukum. Langkah ini pada dasarnya hanya memotong langkah dari tengah, belum menelisik jauh dan mengoptimalkan pendekatan lain, seperti pendekatan ekonomi, politik dan pendekatan agama.⁸

Dalam konteks ini semakin penting sebuah ikhtiar deradikalisasi yang lebih terstruktur, santun dan penuh dengan nilai-nilai budaya ketimuran yakni melalui internalisasi nilai multikultural dalam kehidupan beragama di

⁷ Zulkifli, *Sufism in Java: The Role of the Pesantren in the Maintenance of Sufisme in Java* (Leiden & Jakarta: INIS, 2002), 18- 19.

⁸ Wawancara, KH. Mohammad Ma'mun, *Kepala Pondok Pesantren Al-Falah Ploso*, 29 Juni 2024

masyarakat. Internalisasi nilai multikultural sesungguhnya merupakan gerakan menangkal terhadap nilai-nilai keberagaman yang eksklusif. Nilai-nilai eksklusif tentu tidak diharapkan oleh Islam, karena Islam dalam orientasi dakwahnya senantiasa mengajarkan nilai *rahmatan lil alamin*, penuh dialog dan meninggikan nilai-nilai humanis.

Proses deradikalisasi akan lebih efektif jika melibatkan pondok pesantren. Hal ini karena, pertama pesantren disebut sebagai potensi sarang teroris, persoalan ini mencuat setelah adanya tragedi legian Bali atau yang terkenal dengan Bom Bali I dan Bom Hotel JW. Mariot yang melibatkan Amrozi CS yang memiliki hubungan kental dengan Pesantren Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo. Bahkan Amerika Serikat dan media barat mengklaim beberapa Pondok Pesantren sebagai sarang teroris. Di antaranya Pesantren Hidayatullah yang terletak 35 KM Kota Balikpapan Kalimantan Timur dan Pesantren Al-Mukmin Ngruki Solo Jawa Tengah. Amerika menuduh Abu Bakar Baasyir memiliki jaringan kuat sebagai otak beberapa pengeboman di beberapa tempat tadi.

Upaya deradikalisasi agama melalui pesantren menurut penulis semakin kuat melihat kenyataan bahwa pimpinan Ponpes Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Jawa Tengah KH. Abu Bakar Baasyir pada Kamis 16 Juni 2011, divonis bersalah oleh PN Jakarta Selatan karena terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Kedua, secara kuantitas jumlah pondok pesantren secara nasional cukup besar yakni sejumlah 25.000 pesantren dengan jumlah santri mencapai 3,65 juta santri yang tersebar di 33 provinsi. Hal tersebut merupakan potensi tersendiri sebagai media yang efektif guna melakukan upaya deradikalisasi agama melalui pendidikan multikultural. Ketiga, kehidupan pesantren sarat dengan nilai, pemikiran dan kehidupan yang sederhana, kejujuran, toleran (*tasamuh*), moderat (*tawasuth*). Nilai dan pemikiran tersebut akan sangat

membantu dalam proses deradikalisasi agama dalam rangka penanggulangan terorisme.⁹

Fenomena aksi radikal tersebut sejalan dengan pernyataan Tahir Abbas dalam penelitiannya terhadap fenomena politik atas fundamentalisme dan radikalisme agama di Eropa Barat, khususnya Inggris. Kesimpulan dari penelitian Abbas ini adalah aksi radikal didorong oleh faktor internal penganut agama dalam memahami ayat-ayat Jihad dalam Al-Qur'an.¹⁰ Sikap eksklusif cenderung membuat manusia merasa paling benar, sehingga tidak mau menerima argumen atau ide gagasan dari luar, apalagi jika argumen tersebut datang dari kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dengannya. Terbukti, terjadinya penolakan kemodernan yang datang dari Barat oleh kelompok Boko Haram di Nigeria. Kelompok ini mengutamakan doktrin-doktrin agama untuk melegitimasi jihad melawan kebijakan pemerintah.

Maraknya aksi radikalisme dan terorisme atas nama Islam di dunia Internasional maupun di Indonesia sedikit banyak telah menempatkan umat Islam sebagai pihak yang dipersalahkan. Ajaran jihad Islam seringkali dijadikan sasaran tuduhan sebagai sumber utama terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh sebagian orang Islam. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia khususnya pondok pesantren, juga tidak lepas dari tuduhan yang mendeskreditkan institusi tersebut. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia tertua dalam sejarah Indonesia seringkali dipersepsikan sebagai markas atau sentral pemahaman Islam yang sangat fundamental yang kemudian menjadi akar bagi gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam.¹¹

Pendidikan dan lembaga pendidikan menduduki posisi strategis sebagai penyebar benih radikalisme sekaligus penangkal "deradikalisasi" dari gerakan Islam radikal. Studi tentang radikalisme dan terorisme mensinyalir adanya lembaga pendidikan Islam tertentu (terutama lembaga non formal seperti

⁹ Edi Susanto, Pendidikan Agama Berbasis Multikultural (Upaya Strategis Menghindari Radikalisme), *KARSA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. IX, No. 1, 2006. 785

¹⁰ Three Anonymous, "The Populair Discourse of Salafi Radicalism and Salafi Counter-Radicalism in Nigeria: A case Study of Boko Haram", *Journal Religion in Afrika* 42 (2012): 118-144.

¹¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam Vol 1 No. 2* (2012): 131-151.

pesantren) telah mengajarkan fundamentalisme dan radikalisme kepada peserta didik yang kemudian memicu Jusuf Kalla untuk melontarkan ide pengambilan sidik jari dari semua santri.¹²

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) ada 198 Pesantren dari 27.722 pesantren di Indonesia yang terindikasi mengajarkan benih radikalisme. Pondok pesantren yang seharusnya menjadi penebar nilai-nilai keislaman yang *rahmatan lil 'alamin* tetapi justru terindikasi menanamkan benih ajaran radikal. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian besar bagi pemerhati pendidikan Islam agar fenomena *Islamophobia* di dunia internasional tidak semakin berkembang.¹³

Sesuai dengan deskripsi Husein Muhammad, Indonesia pada dasarnya sudah menjadi bagian dari substansi Negara Islam yang hakiki karena Negara sudah mampu menjaga dan menjamin warga masyarakat Muslim dan non-Muslim, sehingga segala aktivitas anak bangsa bisa berjalan dengan lancar dan aman termasuk dalam menjalankan tugas dan fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni bidang pendidikan dan pengajaran baik di pendidikan umum ataupun di pendidikan Islam termasuk pendidikan pesantren.¹⁴

Hasil penelitian Asrori, Zulfadli, Susanto, Munip, dan Kholik menjelaskan bahwa gerakan radikalisme keagamaan di Indonesia merupakan fenomena nyata yang menjadi wacana aktual karena semakin hari semakin menguat wacana radikalisme keagamaan Islam yang dipengaruhi oleh

¹² Ian G. Barbour, *Juru Bicara Tuhan*, terj. E.R. Muhammad (Bandung: Mizan, 2000); M. Amin Abdullah, "Religion, Science And Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science", *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 52, No. 1 (2014), 175-203.

¹³ Lihat <https://www.alinea.id/infografis/pesantren-radikal-versi-bnpt-b2feP9BiO>, diakses pada tanggal 13 April 2023. Juga Islamfobia merupakan istilah kontroversial yang merujuk pada prasangka dan diskriminasi pada Agama Islam dan Muslim. Istilah itu sudah ada sejak tahun 1980-an, dan semakin populer setelah terjadinya peristiwa serangan 11 september 2001 di Amerika. Lihat Sandra Fredman, *Discrimination and Human Right* (London: Oxford University Press), 121.

¹⁴ Husein Muhammad mengklasifikasi Negara Islam (daral- Islam) menjadi lima kategori: Pertama, praktik ritual hidup agama Islam berjalan masih bisa dilaksanakan secara terbuka seperti shalat, puasa, zakat, dan praktik hidup kufr tidak menonjol dan tidak massif. Kedua, praktik ritual umat Islam dilaksanakan terbuka walaupun praktik kufr juga juga menonjol dan massif. Ketiga, berdasarkan umat Islam kuat secara fisik dan militer. Keempat, berdasarkan jumlah mayoritas Muslim dari golongan non-Muslim. Kelima, berdasarkan pimpinan negaranya jika Muslim. Imam Nawawi, *Sketsa Neo-Khawarij: Wahabisme Fundamentalisme, dan Khilafatisme* (Yogyakarta: Diandra Kreatif bekerjasama dengan Damar Aksara, Situbondo, 2017), h. 175- 176

beberapa faktor, yakni *Pertama*, arus budaya global yang membawa misi radikalisme sebagai contoh organisasi keagamaan seperti Hizbut Tahrir yang membawa misi pendidikan radikal dan mendidik anak-anak untuk membenci ideologi Pancasila dan NKRI.

Kedua, penyebaran doktrin Wahabisme yang telah membawa misi pemurnian dan pemangkasan budaya masyarakat Indonesia dengan gerakan Arabisasi. Doktrin Wahabisme yang mensakralkan budaya Islam yang berkarakter Arab dibawa oleh golongan Islam radikal untuk mendidik dan mendoktrin peserta didik menjadi lebih eksklusif, sehingga melahirkan anak didik yang memiliki pandangan tertutup, bahkan radikal. Pesantren yang beraliran wahabisme memiliki kecenderungan *introvert* dan memberikan sumbangan terhadap lahirnya radikalisme.

Ketiga, adanya kesenjangan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya radikalisme keagamaan. Kondisi negara-negara Timur Tengah yang kacau terutama di Afghanistan, Palestina, Irak, Yaman, Mesir, Suria, dan Turki terjadi sebagai akibat dari adanya kesenjangan ekonomi dan pemiskinan struktural yang lahir dari adanya intervensi negara-negara Barat yang terlalu besar terhadap negara-negara Muslim. Pendidikan keagamaan radikal yang terjadi di Indonesia berbentuk lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu agama Islam yang dihubungkan dengan situasi konflik di dunia Islam misalnya konflik antara Palestina dan Israel. Tujuan akhir dari pendidikan tersebut adalah mendidik peserta didik agar berwawasan eksklusif dan bersikap keras yang pada akhirnya memiliki mental dan perilaku berani mati dalam menyebarkan pesan-pesan keagamaan.¹⁵

Golongan radikal Islam telah menyebarkan misi dan gerakannya secara masif di Indonesia. Agenda misi golongan radikal Islam dilakukan melalui

¹⁵ Ahmad Asrori, "Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas", *Kalam*, Vol 9 No 2, (2017): 266-267; Zulfadli, "Radikalisme Islam dan Motif Terorisme di Indonesia", *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 22 No 1, (2017): 173-174; Edi Susanto, "Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal Di Pondok Pesantren", *Tadris*, Vol 2 No 1(2007): 1-3. Juga sejalan dengan Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1 No 2, (2022): 160; Abdul Kholik, "Pendidikan Islam dan Fenomena Radikalisme Agama", *Jurnal Kependidikan*, Vol. 5 No. 1, (2017): 18-19.

jaringan masjid, lembaga pendidikan, Majelis Taklim, birokrasi dan juga melalui media sosial. Golongan radikal Islam itu menjadi masif terutama sejak penghujung pemerintahan Orde Baru dan puncaknya ketika terjadi reformasi di Indonesia tahun 1998. Golongan radikal Islam itu semakin berkembang terutama melalui lembaga pendidikan, masjid, birokrasi, pesantren dan media sosial. Golongan radikal Islam itu berusaha menjadikan negara Indonesia sebagai basis pendidikan dan kaderisasi yang militan untuk menegakkan negara Islam versi mereka, bahkan mereka mengamalkan dan mengajarkan doktrin jihad hingga aksi kekerasan dalam menerapkan doktrin-nya.¹⁶

Golongan radikal Islam itu semakin masif terutama dalam peran politik pasca pemerintahan Orde Baru yang kemudian berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan muslim Indonesia. Arus reformasi yang lahir setelah Orde Baru yang kemudian melahirkan kehidupan demokratis justru dimanfaatkan oleh golongan radikal Islam untuk mengajarkan doktrin Islam yang ekstrim atau radikal terhadap masyarakat Islam melalui berbagai media jaringannya. Karenanya, sistem demokratis yang menjadi idealisme bangsa Indonesia termasuk muslim Indonesia harus diproteksi oleh peraturan perundang-undangan yang mampu menggaransi adanya kebebasan kehidupan yang sesuai ideologi Pancasila dan UUD-NRI 1945 dalam wadah NKRI.¹⁷

Hasil jejak pendapat pada tahun 2017 dari penelitian Wahid Foundation menemukan bahwa hampir 60% peserta kegiatan kerohanian Islam (rohis) di Institusi Pendidikan *siap berjihad dengan kekerasan*. Hasil penelitian Badan Intelijen Negara (BIN) merilis bahwa 24% mahasiswa dan 23,3% pelajar menyatakan persetujuannya untuk melakukan aksi jihad dengan kekerasan. Demikian juga pada tahun 2017, penelitian Mata Air Foundation dan Alvara Research Center merilis bahwa 23,5% mahasiswa dan 16,3% pelajar beranggapan bahwa Indonesia perlu diperjuangkan menjadi negara Islam untuk

¹⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman AlQur'an dan Hadis", *Religia*, Vol. 13, No. 1, (2010): 81; Mochamad Thoyyib, "Radikalisme Islam Indonesia", *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, (2018).

¹⁷ Masdar Hilmy, "Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca-Orde Baru", *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 39 No. 2. (2015): 407.

menerapkan hukum agama. Pada bulan Juni 2017, penelitian Saiful Mujani Research and Consulting juga merilis bahwa 9,2 % masyarakat Indonesia setuju terhadap pendirian khilafah (negara islam) di Indonesia. Badan Intelijen menemukan 39% mahasiswa di Indonesia yang radikal.¹⁸

Data mutakhir menunjukkan bahwa dunia pendidikan juga tidak lepas dari adanya pengaruh nasional dan global yang membawa arus budaya beragama dan berpikir yang radikal dan eksklusif, tidak akomodatif terhadap adanya perbedaan, bahkan memiliki kecenderungan menafikan adanya perbedaan. Pendidikan Islam seperti pesantren kemudian menjadi penting dalam mendidik dan membentuk karakter peserta didik yang mampu memiliki sikap inklusif, akomodatif dan relatif. Apalagi pesantren adalah salah satu lembaga fundamental yang pada awalnya mengajarkan nilai-nilai dan sikap tersebut. Namun saat ini ada juga pesantren yang mengajarkan paham radikal Islam. Adanya budaya pesantren yang mengalami pergeseran orientasi dari paradigma beragama Islam yang inklusif dan akomodatif menjadi eksklusif, bahkan radikal, dapat ditemukan dalam kultur pesantren yang mengajarkan eksklusifisme dan radikalisme, baik dari sisi kurikulum maupun doktrin pembelajaran.¹⁹

Dalam menjawab hal tersebut, maka pendidikan pesantren multikultural tetap dibutuhkan dalam mengajar peserta didik agar memiliki jiwa dan sikap inklusif, akomodatif dan relatif.²⁰ Kontruksi pendidikan multikultural pesantren itu dalam menjawab ancaman gerakan golongan radikal Islam dilakukan melalui beberapa cara, yakni melakukan pementapan

¹⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia/indonesia-43949279>, diakses 2 Juli 2024.

¹⁹ Abdul Malik, Ajat Sudrajat, dan Farida Hanum, "Kultur Pendidikan Pesantren dan Radikalisme", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 4. No. 2, (2017): 103.

²⁰ Pendidikan multikultural merupakan konsep inklusif yang digunakan untuk menjelaskan berbagai program, praktik dan materi pendidikan yang disusun untuk membantu peserta didik dari berbagai kelompok yang berbeda untuk memberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan. Richard Race, *Multiculturalism and Education: Contemporary Issues in Education Studies* (London: Continuum International Publishing Group, 2011), 5.

ideologi toleransi keagamaan, revitalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila, dan pembangunan kehidupan masyarakat sipil.²¹

Setelah dikaji konsep pendidikan multikultural, agaknya memang relevan untuk dijadikan konsep pendidikan di Indonesia. Namun, disisi lain ada kritik terhadap pendidikan multikultural. Kritik ini disampaikan oleh Prihanto dalam tulisannya yang berjudul, (Kritik atas konsep Pendidikan Multikulturalisme). Ia mengatakan bahwa pendidikan multikultural mengajarkan untuk menghargai keragaman budaya, etnis, ras, suku dan aliran-aliran keagamaan. Jika yang diajarkan hanya toleransi tentunya tidak bermasalah. Namun, bila dianalisis secara paradigmatik, pendidikan model ini mengalami problem teologis. Sebab bukan sekedar toleransi yang diajarkan, tetapi paham pluralisme yang berbasis pada relativisme.²²

Azyumardi Azra menegaskan bahwa multikulturalisme adalah sebagai pandangan dunia yang mengakui dan menerima keragaman budaya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kehidupan multikultural merupakan *sunnatullah* yang harus dirawat dan dijaga, termasuk di Negara Indonesia. Cara merawat dan menjaganya adalah membumikan pandangan multikulturalisme kepada masyarakat. Upaya yang paling efektif menjaga dan merawat multikulturalisme adalah melalui pendidikan. Ada dua model yang dapat dikembangkan, pertama pendidikan dengan mengedepankan multikulturalisme yang saling terintegrasi dan yang kedua mata pelajaran khusus yang memuat nilai-nilai multikultural.²³

Pendidikan multikultural memberikan secercah harapan dalam mengatasi beberapa gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini mengingat pendidikan multikultural adalah pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan, heterogenitas, pluralitas dan keragaman, apapun aspek

²¹ Abdul Aziz, "Memperkuat Kebijakan Negara dalam Penanggulangan Radikalisme di Lembaga Pendidikan", *Hikmah Journal Of Islamic Studies*, Vol. 12, No. 1, (2016): 30; Zulfani Sesmiarni, "Membendung Radikalisme dalam Dunia Pendidikan Melalui Pendekatan Brain Based Learning", *Kalam*, Vol. 9. No.2,(2017): 233.

²² Prihanto, *Kritik atas Konsep Pendidikan Multikulturalisme* (Jakarta: Gramedia, 2014), 45.

²³ Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 31.

dalam masyarakat.²⁴ Penanaman nilai-nilai multikultural tersebut harus ditanamkan pada setiap jenjang pendidikan dan harus melibatkan berbagai tatanan masyarakat dalam membentuk karakter anak didik khususnya dalam memahami dan saling menghormati antara berbagai suku, sehingga menjadi kontribusi dalam usaha mentransformasi nilai dan karakter budaya lokal yang berwawasan nasionalisme.

Berbagai masalah juga persoalan yang terjadi di lingkungan pesantren mengenai multikultural yang diterapkan pendidikan sekolah. Pesantren merupakan tempat menuntut ilmu agama, menyatukan dan menerima pemahaman antar individu, akan tetapi nyatanya banyak terjadi perkelahian juga kerusuhan lainnya. Adapun budaya bullying, menghina dan mengejek akan bahasa, budaya, ataupun lainnya secara langsung.

Penelitian ini menggambarkan penyelenggaraan pendidikan di sebuah pesantren. Pesantren tersebut telah menerapkan pendidikan yang berwawasan multikultural. Nama pesantren tersebut adalah pondok pesantren Al-Falah Ploso. Penulis tertarik untuk menjadikan pesantren ini sebagai objek penelitian karena pesantren ini memiliki santri yang berlatar belakang majemuk dan berasal dari ras, suku, strata sosial yang berbeda. Selain itu, pesantren tersebut juga bersikap inklusif, terbukti dengan rukunnya dengan masyarakat sekitar meskipun terdapat umat dengan keyakinan non muslim seperti kristen.²⁵ Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh KH. Fahim Royyani Djazuli,²⁶

Memang Pondok Pesantren Al-Falah ini pertama kali berdiri itu di lingkungan yang memang benar-benar tidak mengenal agama. Jadi dulu disini ini memang basisnya sarang PKI. Dimana pada zaman PKI itu mulai beraksi dulu, memang di daerah sini, makanya karena pondok kita berdiri di lingkungan seperti itu mau tidak mau harus membaaur dengan mereka kalau kita ingin mereka ikut kepada kita, Ketika kita membuat skat/pembatas dengan mereka dengan sangat tinggi maka kita tidak akan bisa mendapatkan mereka, jadi sejak awal pendirian sudah seperti itu. Maka dari itu kita harus pandai untuk bersosialisasi dan

²⁴ Siti Mania, *Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran*. Jurnal Lentera Pendidikan, 2010

²⁵ Wawancara, Rozimun pengurus pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri, 10 Mei 2023

²⁶ Wawancara, KH. Fahim Royyani Djazuli, *Ketua Sub. Keamanan Pondok Pesantren Al-Falah Ploso*, 2 Juli 2024.

berbaur untuk mengenalkan bahwa agama islam itu bukan agama yang menakutkan tapi agama yang benar benar *rahmatan lil alamin*.

Dapat dipahami bahwa Pesantren Al-Falah disini sejak berdirinya sudah melekatkan dan menumbuhkan karakter santri atau masyarakat yang toleran, terbuka, moderat, demokratis, saling menghormati, saling menghargai dan mengedepankan dialog dalam setiap terjadi perbedaan terdapat sebagai lembaga yang mengimplementasikan pendidikan multikultural.

Sejalan dengan apa yang dikatakan Ayzumardi Azra bahwa upaya keberagaman menjadi harmonis dengan multikultural bahwa pada dasarnya merupakan pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keberagaman yang pluralis dan multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa ataupun agama, terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai dan dilindungi serta dijamin eksistensinya.²⁷

Dalam pengamatan awal yang dilakukan peneliti bahwa Pesantren Al-Falah Ploso sangat menjunjung tinggi nilai-nilai multikultural. Nilai-nilai multikultural menjadi hal wajib yang harus dilaksanakan dalam pendidikan multikultural. Yaitu, berupa sikap menghargai perbedaan (*non- diskriminatif*), toleransi, kesetaran, demokrasi dan keadilan. Karena sejak lahir semua manusia memiliki hak yang sama. Hal itu dibuktikan dengan proses penerimaan seluruh santri yang mendaftar tanpa mempertimbangkan latar belakang suku, ras, status sosial, dll. Kemudian, memberikan fasilitas yang sama, membekali santri dengan berbagai kompetensi melalui ragam pelatihan

²⁷ Ayzumardi Azra, *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*, (Jakarta: FE UI, 2007), 85. Juga dalam Ayzumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, (Yogyakarta: Institute Pluralism and Multiculturalism Studies (Impluse) dan Kanasius, 2007), 13

dan kegiatan ekstrakurikuler.²⁸ Sejalan dengan apa yang dikemukakan KH. Muhammad Ma'mun.²⁹

Ya memang kita itu mendidiknya secara utuh, tidak hanya setengah setengah. Saya pikir semua orang itu mempunyai semangat berubah yang sama. Jadi kita disini tidak pernah mengunggulkan santri atau mengistimewakan santri, semuanya sama. Dimana tujuannya semua mengajarkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Semuanya juga mengajarkan dalamnya agama dalam hati, tapi kemudian bagaimana caranya membenahi dan menghilangkan kerusakan. Semisal apabila ada orang yang sudah rusak moralnya bagaimana cara mendekatinya dengan pendekatan yang baik supaya menjadi lebih baik. Kita ini usahanya adalah bagaimana ada orang yang belum baik ini mendapatkan hidayah, dengan cara kita singgungkan, kita sentuhkan dengan agama yang baik.

Dapat dipahami bahwa pendidikan multikultural menjadi penting dikembangkan dan di implementasikan di Pesantren Al-Falah Ploso ini, mengingat latar belakang santri yang mondok di lembaga ini beragam dan sudah pasti berbeda bahasa, budaya, tradisi dan bahkan berbeda secara kemampuan. Sehingga dengan adanya pendidikan multikultural merupakan salah satu upaya mengantisipasi terjadinya konflik dan perpecahan santri.

Pesantren ini juga tidak menyepakati adanya aksi radikalisme agama, aksi atau tindakan radikal dalam mendakwahkan agama Islam. Tidak sepakat dengan tindakan- tindakan kekerasan yang mengatasnamakan jihad membela agama. Sikap yang tegas pernah disampaikan oleh Gus Kautsar Ketika penulis sowan dan menanyakan kepada beliau berkaitan dengan aksi FPI yang berlebihan terhadap dakwah Islam. Lebih dari itu, beliau menilai sikap FPI tersebut bukan mencerminkan sikap seorang muslim. Contoh lain adalah, beliau juga tidak setuju dengan adanya *persekusi* terhadap orang-orang Ahmadiyah. Mereka merupakan warga Negara Indonesia yang berhak mendapatkan hak yang sama sebagai warga Negara yaitu kehidupan yang

²⁸ Observasi, Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, 23 Mei 2024

²⁹ Wawancara, KH. Mohammad Ma'mun Djazuli, *Ketua Pondok Pesantren Al-Falah Ploso*, 30 Juni 2024

aman, nyaman dan sejahtera. Dalam hal perbedaan pemahaman keagamaan itu bisa didiskusikan dengan baik.³⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, antropologi dan sosiologi. Melalui pendekatan ini penulis dapat mengamati segala kegiatan pesantren dalam mengkonstruksikan pendidikan multikultural sebagai upaya deradikalisasi. Kegiatan pesantren yang akan diteliti adalah sistem pendidikan pesantren yang meliputi kurikulum, ekstra kurikuler, seleksi penerimaan santri, pembagian asrama (tempat tinggal), bimbingan konseling, kerja sama lembaga, petuah-petuah (fatwa-fatwa) pimpinan pesantren, dll. Tujuan mengamati kegiatan pesantren adalah untuk melihat ada atau tidaknya sikap driskiminasi dan radikal. Jika ditemukan sikap tersebut maka pesantren dinyatakan gagal mengimplementasikan pendidikan multikultural, begitupun sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan penelitian ini adalah mengapa kontruksi pendidikan multikultural pesantren dibutuhkan di Indonesia? Dari pokok permasalahan penelitian tersebut, penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang melandasi lahirnya Pendidikan multikultural di Pesantren Al-Falah Ploso ?
2. Bagaimana konstruksi Pendidikan multikultural sebagai upaya radikalisme di pesantren Al-Falah Ploso?
3. Bagaimana relevansi Pendidikan multikultural di pesantren Al-Falah Ploso sebagai Upaya Deradikalisasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk membuktikan signifikansi konstruksi pendidikan multikultural di pesantren yang diuraikan menjadi tiga tujuan, diantaranya:

1. Menemukan bagaimana landasan pendidikan multikultural di pesantren Al-Falah Ploso.

³⁰ Wawancara, KH. Abdurrohman Al-Kautsar, *Ketua Madrasah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso*, 2 Juli 2024.

2. Menganalisis dan menemukan konstruksi pendidikan multikultural di pesantren Al-Falah Ploso.
3. menganalisis relevansi pendidikan multikultural di pesantren Al-Falah Ploso sebagai Upaya Deradikalisasi di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian atas penelitian konstruksi pendidikan multikultural di pesantren Al-Falah Ploso dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Mengungkapkan landasan pendidikan multikultural di pesantren Al-Falah Ploso yang dapat digunakan sebagai kerangka berfikir dalam membangun tradisi keilmuan agama Islam multikultural di Indonesia.
2. Menggali dan mengeksplorasi konstruksi pendidikan multikultural di pesantren Al-Falah Ploso dalam membangun tradisi keilmuan agama Islam berbasis multikultural di Indonesia.
3. Membuktikan relevansi pendidikan multikultural di Pesantren Al-Falah Ploso yang diwujudkan dalam gerakan deradikalisasi pendidikan di Indonesia, sehingga ulama, ilmuwan, aktifis Islam, dan pemerintah dapat menerapkan dan melestarikan wacana Islam inklusif, akomodatif dan relatifis di Indonesia terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan gerakan Islam radikal yang membawa dampak negatif dan instabilitas nasional di Indonesia.
4. Selain itu, konstruksi pendidikan multikultural di Pesantren Al-Falah Ploso dapat digunakan sebagai parameter dan landasan dalam menyusun dan merumuskan kurikulum pesantren multikultural dan kurikulum PAI multikultural di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Sebuah hal yang penting mesti dilakukan peneliti yaitu melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini biasa disebut dengan istilah *prior research*. *Prior research* perlu dilakukan dengan alasan pertama, menghindari adanya persamaan ilmiah, kedua, untuk membandingkan kekurangan atau kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang

akan dilakukan. Ketiga, untuk menggali informasi penelitian atas tema yang diteliti dari peneliti sebelumnya.³¹

Kajian mengenai pendidikan multikultural memang telah banyak dilakukan oleh akademisi, baik dalam bentuk penelitian individu ataupun kelompok, berupa karya ilmiah, buku-buku dan artikel. Berdasarkan penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur yang membahas tema pendidikan multikultural yang bisa dijadikan sebagai suatu bahan dan perbandingan oleh penulis dalam penelitian ini. Literatur-literatur yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian David J. Banks, “*Resurgent Islam and Malay Rural Culture: Malay Novelists and the Invention of Culture*”. Membahas tentang karakter dan isi dari empat novel yang menyajikan konstruksi kehidupan moral desa-desa Melayu yang menempatkan Islam, dalam bentuk karakter Muslim yang kuat dan saleh, dalam posisi sentral dalam tatanan sosial Melayu. Karena fiksi adalah media ekspresi kreatif, orang mungkin bertanya apakah novel ini sengaja dirancang untuk menumbuhkan kebangkitan Islam di Malaysia atau apakah mereka akan dijelaskan dengan cara lain. Keragaman perspektif politik David J. Banks menganggap bahwa tampaknya hal itu menjadi deskripsi konsepsi sosial, model normatif sadar masyarakat, umum di desa-desa Melayu pada saat kemerdekaan. Mereka disajikan kepada kelompok penguasa Malaysia sebagai peringatan dan prediksi, yang sebagian telah menjadi kenyataan di tahun-tahun berikutnya ketika Islam telah menjadi kekuatan utama dalam politik Melayu.³² Melalui jurnal ini maka penulis dapat mengetahui karakter kehidupan masyarakat Melayu yang menempatkan Islam sebagai ajaran yang kuat.

Kedua, Abdurrahman Kasdi, “Pendidikan Multikultural di Pesantren: Membangun Kesadaran Keberagaman yang Inklusif” menguraikan bahwa era sekarang ini pesantren dihadapkan pada beberapa fenomena perubahan sosial

³¹ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi: Kaum Muda NU Merobek Tradisi* (Yogyakarta: ArRuz Media, 2007), 19-20

³² David J. Banks, “*Resurgent Islam and Malay Rural Culture: Malay Novelist and the Invention of Culture*” *American Ethnologist* 1, no. 3 (2015): 54.

dan multikulturalisme yang tidak bisa di hindari. Pesantren sebagai media pembebasan umat dihadapkan pada tantangan bagaimana mengembangkan teologi multikultural sehingga didalam masyarakat pesantren akan muncul pemahaman yang inklusif untuk harmonisasi agama-agama, budaya dan etnik di tengah kehidupan masyarakat.³³ Melalui jurnal ini penulis dapat mengetahui bahwa pesantren dituntut untuk proaktif merenspon isu-isu global yang berkembang. Karena pesantren itu harus menjadi garda depan untuk memerangi fanatisme madzhab karena imam madzhab sendiri melarang pengikutnya bertaqlid kepadanya.

Ketiga, Abdullah Aly, “Studi Deskriptif Tentang Nilai-nilai Multikultural dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam” menjelaskan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga Pendidikan yang tertua dan berpengaruh di Indonesia, berdasarkan dalam penelitian ini ternyata pesantren telah mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai multikultural kepada para santri. Nilai-nilai multikultural ini bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi, yang diolah dan ditulis oleh para ulama di Indonesia pada masa lalu dalam bentuk kitab kuning, menjadi kurikulum Pendidikan di Sebagian besar pesantren di Indonesia.³⁴ Melalui jurnal ini penulis dapat mengetahui bahwa untuk menanamkan nilai-nilai multikultural dalam masyarakat, Pendidikan memegang peranan penting dan strategis. Karena melalui Pendidikan, bangsa Indonesia bisa mempersiapkan generasi selanjutnya yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai multikultural.

Keempat, Abu Kholish dan Muhammad Chafidz Ali Wafa, “Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Tradisional dan Modern sebagai Upaya Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, Studi di Pondok Pesantren Asy-Syamsuriyah Brebes” menjelaskan bahwa implementasi model Pendidikan multikultural pondok pesantren tradisional dan modern di Pondok Pesantren Asy-Syamsuriyah Brebes dapat dilihat dalam pola aplikasi

³³ Abdurrahman Kasdi, *Pendidikan Multikultural di Pesantren: Membangun Kesadaran Keberagaman yang inklusif*. Jurnal Ad-Din, vol. 4, No. 2 (2012)

³⁴ Abdullah Aly, *Studi Diskriptif tentang Nilai-Nilai Multikultural dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam*. Jurnal Ilmiah Pesantren, Vol. 1. No. 1 (2015).

integralistik Pendidikan sekolah ke dalam lingkungan Pendidikan pesantren yang mengacu pada Al-Qur'an surat Al Hujurat ayat 13. Implementasi model Pendidikan multikultural pondok pesantren tradisional dan modern di Pondok Pesantren Asy-Syamsuriyah Brebes didasarkan pada tiga aspek, yaitu aplikasi penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari santri di lingkungan pondok pesantren, penerapan nilai-nilai filosofis berbasis multikultural dan implementasi pemberian materi pelajaran berbasis multikultural. Pondok Pesantren Asy-Syamsuriyah Brebes juga turut andil dalam menjaga NKRI, itu terbukti dengan kontribusi Pendidikan dan pengajaran yang sudah diberikan kepada santri dan masyarakat sekitar baik secara internal dalam Pendidikan formal pesantren maupun eksternal dalam bentuk diskusi maupun pelatihan.³⁵ Melalui jurnal ini maka penulis dapat mengetahui bahwa penelitian ini masih bersifat kasuistik, sehingga hasil pembahasannya hanya bisa diterapkan pada lembaga pendidikan yang menjadi tempat pembahasan. Sebagai rekomendasi pembahasan, diperlukan pembahasan lanjutan mengenai konstruksi Pendidikan multikultural dengan secara lebih luas sehingga pembahasannya bisa diterapkan di pondok pesantren lainnya.

Kelima, Muhammad Asror, "Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Upaya Mengembangkan Sikap Toleransi Santri di Pondok Pesantren" menjelaskan bahwa bentuk Pendidikan multikultural dilakukan dalam bentuk penempatan santri yang berbeda latar belakang etnis, budaya dan ekonomi dalam satu asrama yang heterogeny. Kondisi tersebut memungkinkan santri memahami perbedaan budaya dan bahasa yang mendorong timbulnya rasa kebersamaan dan penerimaan terhadap santri. Hal ini dapat dilihat dari materi tentang *ahlussunnah wal jamaah* (aswaja), yang mengedepankan sikap *tasawuth* (moderat), *I'tidal* (proporsional), *tasamuh* (toleran) dan *tawazun* (seimbang). Selain itu materi yang berbasis multikultural diajarkan dengan menjelaskan tentang ayat dan hadist yang menekankan pentingnya *ukhuwah*

³⁵ Abu Kholish dan Muhammad Chafidz Ali Wafa, *Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Tradisional dan Modern sebagai Upaya Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi di Pondok Pesantren Asy Syamsuriyah Brebes)*. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner, Vol. 1, No. 1. (2022).

(persaudaraan), baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah basyariyah. Metode pembelajaran yang diterapkan diantaranya bahtsul masail fihiyyah, yaitu forum diskusi masalah-masalah fiqh. Diskusi semacam ini dapat menjadikan pembelajaran bagi santri agar dapat bersikap demokratis dan menghargai pendapat orang lain. Interaksi sosial menggambarkan komunitas yang plural yang didasarkan pada nilai-nilai akhlakul karimah.³⁶ Melalui jurnal ini maka penulis dapat mengetahui tentang Pendidikan pesantren yang multikultural mengenai sikap dan pemikiran akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya.

Keenam, dari Choirul Anam dan Tuti Marlina, “Implementasi Pendidikan Multikultural di SD Negeri Rejoagung 2 Jombang” menjelaskan bahwa implementasi Pendidikan multikultural lebih berorientasi pada kegiatan yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan agar siswa berkembang menjadi pribadi yang toleran sehingga mampu bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan. Kemudian evaluasi Pendidikan multikultural dilakukan selama proses pembelajaran yang disebut dengan evaluasi proses dan evaluasi akhir yang disebut dengan evaluasi hasil. Dalam rangka implementasi Pendidikan multikultural guru mengembangkan dua model evaluasi yang disesuaikan dengan indikator Pendidikan multikultural yang telah tercantum dalam RPP.³⁷ Melalui jurnal ini maka penulis dapat mengetahui setiap peserta didik menanamkan nilai-nilai positif sebagaimana yang terdapat pada Pendidikan multikultural.

Ketujuh, Nafis Nailil Hidayah, “Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Proses pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018” menjelaskan bahwa Pendidikan multikultural dipandang merupakan suatu upaya membentuk karakter peserta

³⁶ Muhammad Asror, *Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Upaya Mengembangkan Sikap Toleransi Santri di Pondok Pesantren*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 1 No. 1 (2022).

³⁷ Choirul Anam dan Titi Marlina, *Implementasi Pendidikan Multikultural (Studi Kasus di SD Negeri Rejoagung 2 Jombang)*. Jurnal International of Educational Resources, Vol. 2 No. 5 (2002).

didik. Tanpa adanya sosialisasi secara intern mengenai Pendidikan multikultural pihak sekolah telah menyadari akan pentingnya Pendidikan multikultural, sehingga telah sejak dari pertama berdiri Pendidikan multikultural telah dilaksanakan. Mengenai waktu pelaksanaan implementasi Pendidikan multikultural bisa dikatakan 24 jam perhari dikarenakan adanya sistem pendidikan wajib asrama. Dengan demikian implementasi pendidikan multikultural dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan karakter nasionalisme peserta didik pondok pesantren Al Muayyad Surakarta.³⁸ Melalui jurnal ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi Pendidikan multikultural dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan jiwa nasionalisme peserta didik.

Kedelapan, Huda, “Eksistensi Pesantren dan Deradikalisasi Pendidikan Islam di Indonesia (Menyemai Spirit Toleransi dan Pendidikan Islam Multikultural)” menjelaskan bahwa Islam sebagai agama kasih sayang universal (*rahmatan lil ‘alamin*) yang mengajarkan Pendidikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak asasi manusia, menghormati ragam budaya dan kultur masyarakat, mengidamkan kedamaian, keadilan, toleransi dan sikap yang seimbang, dan manifestasi akhlak mulia lainnya. Pendidikan Islam (Pesantren) yang mengajarkan kebencian terhadap pendapat dan keyakinan yang berbeda sangatlah tidak ideal bagi kelangsungan kebhinekaan dan keberagaman di Indonesia. Pesantren yang terinfiltrasi oleh radikalisme perlu reorientasi kearah yang sesuai dengan spirit Islam yang mengajarkan saling menghargai dan persaudaraan. Pendidikan Islam yang inklusif, toleran, multikulturalis, dan humanis yang mengajarkan kasih sayang, kesantunan, menghormati orang lain, dan kerukunan, sehingga di masa

³⁸ Nafis Nailil Hidayah, *Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Proses Pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018*, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Vol. 2 No. 1 (2018)

mendatang dapat mendorong terwujudnya keharmonian dalam keberagamaan di bumi Nusantara.³⁹ Melalui jurnal ini maka penulis dapat mengetahui pentingnya menentukan pilihan nilai multikultural yang akan dijadikan pegangan hidupnya seperti kebebasan, persamaan, toleransi, kesetiakawanan, keadilan, kejujuran dan kesabaran baik dalam lingkup lembaga pendidikan, masyarakat maupun negara.

Kesembilan, Dafri Harweli dan Zulfani Sesmiarni, “Aplikasi Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren” menjelaskan bahwa tujuan Pendidikan multikultural adalah integrasi Pendidikan dalam kurikulum, konstruksi ilmu pengetahuan, pengurangan prasangka, pedagogik, kesetaraan manusia dan pemberdayaan sekolah. Sedangkan strategi yang diterapkan dalam merealisasikan Pendidikan multikultural di lembaga Pendidikan keagamaan berorientasi pada peserta didik (*student centered approach*) dan kedua, berorientasi atau berpusat pada pendidik (*teacher centered approach*). Nilai-nilai Pendidikan multikultural di pondok pesantren yaitu menanamkan nilai demokrasi yang saling menghargai, nilai toleransi yang saling menghormati, nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan nilai kebersamaan yang saling tolong menolong.⁴⁰ Melalui jurnal ini maka penulis dapat mengetahui bahwa Pendidikan multikultural sangat penting dan perlu untuk diajarkan di pondok pesantren. Karena realitas kehidupan seseorang pasti bersinggungan dengan berbagai macam perbedaan. Dalam penerapannya nilai-nilai Pendidikan multikultural dengan menjunjung tinggi sikap toleransi yang dibutuhkan ditengah-tengah lingkungan keberagaman.

Kesepuluh, Wasito Raharjo Jati, “*Toleransi Beragama Dalam Pendidikan Multikulturalisme Siswa SMA Katolik Sang Timur Yogyakarta*”. menyimpulkan bahwa prinsip “rumah bersama” menjadi contoh penting dalam

³⁹ Muallimul Huda, *Eksistensi Pesantren dan Deradikalisasi Pendidikan Islam di Indonesia (Menyemai Spirit Toleransi dan Pendidikan Islam Multikultural)*. Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 01 (2018)

⁴⁰ Dafri Harweli dan Zulfani Sesmiarni, *Aplikasi Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren*. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, Vol. 3 No. 1 (2024)

menumbuhkan sikap toleransi di antara siswa. Siswa diperlakukan sebagai anggota keluarga dekat dalam pergaulan dengan civitas akademika lainnya. Prinsip “rumah bersama” ini seperti *melting pot*, tempat semua perbedaan ras, suku, agama, dan lainnya dilebur menjadi satu identitas tunggal sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Religiusitas adalah instrumentasi penerapan nilai universalitas agama mengenai tenggang rasa, toleransi, maupun perdamaian untuk menjaga semangat multikulturalisme dan memperkuat persaudaraan di antara para siswa.⁴¹ Melalui jurnal ini maka penulis dapat mengambil simpulan perlu adanya media pemersatu untuk meningkatkan kebersamaan dalam berbagai perbedaan.

Kesebelas, Muhammad Abrar Parinduri dalam disertasinya Pendidikan di Sekolah Berbasis Agama dalam Perspektif Multikultural (Studi Kasus pada Sekolah Islam dan Sekolah Kristen di Sumatra Utara) membuktikan bahwa pendidikan yang menanamkan ragam perbedaan agama, budaya dan ras dapat menumbuhkan sikap dan perilaku multikultural.⁴²

Implementasi penanaman sikap dan perilaku multikultural pada sekolah berbasis agama terlaksana dengan antara lain: pertama melalui kebijakan sekolah ditandai dengan adanya kesediaan untuk menerima siswa dengan latar belakang agama yang berbeda. Kedua, internalisasi nilai-nilai multikultural melalui pengembangan kurikulum dan proses belajar mengajar. Ketiga, proses interaksi sosial yang terjadi di masing-masing sekolah telah memberikan pelayanan yang sama terhadap semua peserta didik, mengembangkan prasangka baik di kalangan siswa dan memberikan penghargaan yang sama terhadap nilai-nilai budaya yang berbeda yang dikembangkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fisiologis dan sosiologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan.

⁴¹ Jati, Warsito Raharjo, “Toleransi Beragama Dalam Pendidikan Multikultural SMA Katolik Sang Timur Yogyakarta,” Jurnal Cakrawala Pendidikan 1, No. 1 (2014).

⁴² Parinduri, Muhammad Abrar, *Pendidikan di Sekolah Berbasis Agama dan Perspektif Multikultural (Studi Kasus pada sekolah Kristen di Sumatra Utara)*, Disertasi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 10.

Parinduri mengemukakan bahwa pendidikan multikultural terstruktur di sekolah disebabkan oleh kurikulum formal yang ada di sekolah melalui kearifan lokal masyarakat yang menjadi modal budaya siswa.

Kedua belas, Koidah dalam disertasinya *Implementasi Budaya Toleransi Dalam Pendidikan Agama (Analisis pada siswa SMA di Cirebon Jawa Barat)* penelitian ini menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan dan diberikan untuk siswa SMA agar mereka dapat hidup dalam keragaman dengan mengajarkan budaya toleransi.⁴³

Koidah menyebutkan komunitas Pemuda Lintas Iman, (Pelita) Perdamaian, dengan kegiatan mengajak kawan-kawan muda yaitu siswa remaja SMA dari berbagai agama yang ada di Cirebon untuk berdialog. Selain itu penelitian ini menyebutkan bahwa di SMA yang menjadi fokus penelitian ini yaitu pada SMA Negeri 1 Plumbon, SMA Negeri 1 Sumber, SMA Negeri 1 Jamblang dan SMA Negeri 1 Palimanan memiliki gerakan Rohani Islam (Rohis) dan salah satu programnya adalah gerakan tolak radikalisme. Dalam disertasi ini juga menyebutkan organisasi Pemuda Theravada Indonesia (PATRIA), organisasi ini ditujukan untuk siswa SMA sebagai pembekalan awal masuk seorang Budhis, inti dari kegiatan adalah mengajarkan budaya toleransi kepada peserta.

Penelitian Koidah membuktikan bahwa budaya toleransi diimplementasikan dalam pendidikan agama, sehingga terjadi kerukunan antar siswa yang majemuk di sekolah. Berbeda dengan penelitian ini bahwa pendidikan multikultural terbangun melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah melalui kurikulum non-formal.

Ketigabelas, M. Muntahibun Nafis dalam disertasinya “Pesantren Pluralis Peran Pesantren Ngalah dalam mengembangkan Nilai-Nilai Pluralisme di Tengah Masyarakat yang Multikultural”, menemukan bahwa Kiai (pemimpin pesantren) memiliki *power* dalam menentukan arah dan tujuan pesantren, termasuk menjadikan *stakeholder*, pesantren sesuai dengan

⁴³ Koidah, *Implementasi Budaya Toleransi dalam Pendidikan Agama (Analisis Pada Siswa di Cirebon Jawa Barat)*, Disertasi. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2018), 151-161.

pemahaman dan pemaknaan yang baru terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran tarekat khususnya yang terkait sisi kemanusiaan dan hubungan antar agama.

Teori yang digunakan Muntahibun yaitu teori filsafat Pendidikan perenialisme dan progresivisme. Aliran filsafat progresivisme biasa dikaitkan dengan pandangan hidup yang liberal dengan konsepnya *the liberal road to culture* artinya bahwa adanya pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat seperti fleksibel (tidak kaku, atau tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh suatu doktrin tertentu), *curious* (ingin mengetahui ingin menyelidiki), toleran dan *open-minded* (mempunyai hati terbuka). Muntahibun mengemukakan bahwa kegiatan pesantren yang melibatkan kalangan mahasiswa, dosen, maupun akademisi menunjukkan peran Kiai dalam mengembangkan nilai-nilai pluralis. Kiai berkontribusi pada kemajuan pesantren, dan dalam memimpin pesantren mengembangkan dialog antar agama, yang membangun toleransi antar santri dan siswa pemeluk agama non-Islam dengan menerima pelbagai kunjungan siswa-siswa non-muslim ke Pesantren.⁴⁴ Temuan Muntahibun ini menunjukkan bahwa pemimpin memberikan pengaruh untuk mengujudkan visi dan misi sebuah lembaga pendidikan.

Keempatbelas, Muhammad Arifin dan Ari Kartiko, “Strategi Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Madrasah Bertaraf Internasional”⁴⁵ menunjukkan bahwa strategi Pendidikan agama Islam berbasis multikultural di MBI Amanatul Ummah memiliki beberapa strategi, yakni dengan cara menanamkan jiwa nasionalisme dengan menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Selain itu juga dengan cara memasukkan nilai-nilai multikultural serta pemahaman akan menghargai perbedaan dalam kegiatan belajar mengajar yang tertuang dalam RPP pembelajaran. Tata tertib yang disusun juga memiliki nilai multikultural sehingga dapat langsung

⁴⁴ Nafis, M. Muntahibun, *Pesantren Pluralisme Peran Pesantren Ngalah dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Pluralisme di Tengah Masyarakat yang Multikultural*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2017), 252.

⁴⁵ Arifin, Muhammad, *Strategi Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Madrasah Bertaraf Internasional*, Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 5, 2022.

mempraktikkan apa yang telah mereka dapat dalam pelajaran di kelas untuk diterapkan dalam kehidupan bersosial masyarakat di sekolah.

Kelimabelas, Nuryadin “Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Karya Pembangunan Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya” menyimpulkan bahwa pesantren tersebut menanamkan nilai-nilai demokrasi, nilai toleransi, nilai humanisme dan nilai inklusif dengan berbagai sisinya seperti keadilan, kerja sama, penghargaan, gotong royong, persaudaraan, kebebasan berkreasi santri dan perdamaian. Penelitian ini hanya berfokus pada temuan penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural di pesantren tersebut melalui pendekatan fenomenologi.⁴⁶

Keenambelas, karya Ifa Nurhayati, Roibin dan Saidatul Karimah, “Kontruksi Nilai Kebangsaan dalam Pendidikan Pesantren Perspektif Buya Syafi’e Maarif” menyatakan bahwa konstruksi nilai kebangsaan dalam Pendidikan pesantren sudah seharusnya pesantren mengajarkan nilai toleransi beragam sehingga kajian di dalam kurikulum pesantren diajarkan pengetahuan tentang agama-agama tidak hanya agama islam saja. Selanjutnya pesantren seharusnya menanamkan *equal citizenship* dengan menanamkan nilai kesetaraan dan keadilan. Kemudian nilai kemanusiaan seharusnya juga terkontruksi dalam Pendidikan pesantren. Dimana pada dasarnya pesantren memiliki perangkat yang baik dalam melakukan penetrasi kesetaraan dalam Pendidikan. Dengan demikian visi kesetaraan dan kemanusiaan Buya Syafi’e Maarif harus melembaga, sehingga dapat dijadikan landasan dalam Menyusun kurikulum sekolah atau pesantren. Sehingga gagasan Buya Syafi’e Maarif tentang visi kemanusiaan dapat dilaksanakan secara massif di lembaga Pendidikan.⁴⁷ Melalui jurnal ini maka penulis mengetahui bahwa Pendidikan multikultural mampu membentengi bangsa ini dari pengaruh luar dan dari pengaruh paham-paham yang tidak sejalan dengan Pancasila dan kebhinekaan.

⁴⁶ Nuryadin, *Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Karya Pembangunan Puruk cahu Kabupaten Murung Raya* (Tesis Program Magister Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

⁴⁷ Ifa Nurhayati, Roibin dan Saidatul Karimah, *Kontruksi Nilai Kebangsaan dalam Pendidikan Pesantren Perspektif Buya Syafi’e Maarif*. Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam. Vol. 16, No. 02. (2022).

Ketujuhbelas, karya Irfan Setia Permana, “Implementasi Toleransi Beragama di Pondok Pesantren Studi Kasus di Pondok Pesantren Universal Bandung”. Dalam karya ilmiah ini menunjukkan bahwa konstruksi pemikiran yang dibangun mengenai toleransi beragama dikategorikan sebagai pemikiran dan sikap inklusif dalam beragama, yaitu pemikiran yang mempercayai adanya kebenaran dalam kepercayaan agama lain. Landasan konstruksi pemikiran tersebut adalah tasamuh, yaitu corak pemahaman keislaman yang moderat. Konsep toleransi beragama ini terimplementasikan dalam kebijakan pondok universal melalui kurikulum kegiatan pendidikan yang merefleksikan Pendidikan yang bercorak multikulturalisme-pluralisme akan tetapi memang masih terdapat kekurangan yang harus dikembangkan secara menyeluruh dimana terkait lingkup kehidupan internal.⁴⁸ Melalui jurnal ini maka penulis dapat mengetahui pembentukan pemikiran untuk memiliki sikap toleransi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa literatur sebelumnya yang telah penulis sajikan, penulis memandang ada hal yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya, yaitu tentang implementasi pendidikan multikultural di pondok pesantren yang memiliki latar belakang santri yang majemuk sebagai upaya deradikalisasi. Oleh karena itu penulis mencoba membahas Konstruksi pendidikan multikultural di pesantren sebagai upaya deradikalisasi.

Terkait dengan objek penelitian yaitu pondok pesantren yang memiliki kesamaan dengan penelitian karya Nuryadin penulis meyakini adanya hasil yang berbeda karena beberapa faktor, yaitu lokasi pondok pesantren yang berbeda, jumlah santri dan pengaitan dengan adanya tindakan deradikalisasi. Penelitian Nuryadin hanya menemukan nilai-nilai multikultural yang telah dilaksanakan di lokasi penelitian tidak dikaitkan dengan upaya deradikalisasi. Begitupula dengan pendekatan yang akan dipakai, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, sosiologi dan antropologi.

F. Definisi Istilah

⁴⁸ Irfan Setia Permana, *Implementasi Toleransi Beragama di Pondok Pesantren Studi Kasus di Pondok Pesantren Universal Bandung*. Jurnal Studi Agama, Vol. 2, No. 1 (2019).

Ada beberapa istilah operasional untuk membatasi studi ini, antara lain:

1. Pendidikan Multikultural

Pengertian multikultural secara Bahasa dapat dipahami dari kata *multi* dan *culture*. Kata *multi* berarti banyak, ragam atau aneka. Sedangkan kata *culture* dalam Bahasa Inggris memiliki beberapa makna, yaitu kebudayaan, kesopanan dan pemeliharaan. Lebih lanjut pengertian multicultural secara etimologi dapat dipahami dari pendapat sebagai berikut Multi berarti plural, dan kultural berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena plural bukan berarti sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis-jenis tetapi juga pengakuan tersebut mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi.⁴⁹

Pendidikan multikultural secara etimologi berasal dari dua term yakni Pendidikan dan multikultural. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengembangan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan dan cara mendidik. Sedangkan menurut istilah multikultural sebenarnya merupakan kata dasar yang mendapat awalan. Kata dasar tersebut adalah kultur yang berarti kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan, sedangkan awalannya adalah multi yang berarti banyak, ragam dan aneka. Dengan demikian multikultural berarti keragaman budaya, aneka, kesopanan atau banyak pemeliharaan.⁵⁰

Dengan melihat dan memperhatikan berbagai pengertian atau definisi Pendidikan multikultural diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan multikultural adalah sebuah proses pengembangan yang tidak mengenal sekat-sekat dalam interaksi manusia. Sebagai wahana pengembangan potensi, Pendidikan multikultural adalah Pendidikan yang menghargai heterogenitas dan pluralitas Pendidikan yang menjunjung nilai

⁴⁹ Mohammad Asror, *Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Upaya Mengembangkan Sikap Toleransi Santri di Pondok Pesantren*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 1 No. 1, (2022).

⁵⁰ Zulqarnain, *Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural*. Jurnal Al-Thariqoh, Vol. 1, No. 2, (2016), 194.

kebudayaan, etnis, suku dan agama serta menghargai dan menghormati keberagaman budaya yang ada di dalam masyarakat.

2. Deradikalisasi

Pengertian deradikalisasi yang berarti kontra ideologi umumnya mengacu pada upaya menghentikan pemahaman dan penyebaran ideologi yang dimiliki teroris. Deradikalisasi menjadi suatu kegiatan yang lebih fokus pada netralisasi pengaruh pemikiran radikal, sehingga ia juga memiliki tujuan kontra radikalisme. Menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF)*, deradikalisasi adalah program kebijakan yang ditujukan kepada pelaku dan napi terorisme, dengan cara memberikan paket-paket bantuan sosial, hokum, politik, pendidikan dan ekonomi.⁵¹

Pengertian deradikalisasi yang telah disebutkan di atas memang cenderung digunakan dalam kebijakan pemerintah untuk melawan teroris. Namun, pada dasarnya masih perlu upaya pengembangan lebih jauh agar lebih inklusif dan tidak terbatas pada kelompok teroris atau mantan teroris. Hal ini disebabkan bahwa upaya netralisasi ideologi pada hakikatnya adalah upaya memperkuat benteng pertahanan ideologis dari warga Negara, terutama sebagai penetrasi terhadap pengaruh ideologi radikal yang dibawa dan dipropagandakan oleh kelompok radikal. Oleh karena itu, kelompok-kelompok, lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat juga merupakan sasaran program deradikalisasi, bahkan harus lebih diintensifkan dan diperluas sosialisasinya sebagai bentuk tindakan preventif sejak dini.

Deradikalisasi memiliki tujuan untuk menetralsir pemikiran radikalisme. Maksudnya untuk membersihkan pemikiran-pemikiran radikalisme yang ada pada teroris sehingga mereka bisa kembali menjadi masyarakat biasa sebagaimana masyarakat lainnya.

⁵¹ Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: YPIKIK, 2010), 85.